

**DAMPAK SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA
TERHADAP PERILAKU POLITIK
(STUDI KASUS MASYARAKAT SUMENEP MADURA DALAM PEMILIHAN
LEGISLATIF 2014)**

*The impact of proportional open system to political behavior (case study the community
Sumenep Madura in an election legislative 2014)*

Abd. Halim

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Sunan Ampel Surabaya
Email: halim_uinsby@yahoo.com

ABSTRACT

Opened Proportional Representation System is considered to encourages candidates to compete in mobilizing mass support for their victory. The mass recruitment effort carried out by pragmatic means, forming the widest network team in charge of winning the candidates, and equipping them with a large amount of money. Network Success Team (Timses) is confronted not only with Timses of candidates of different political parties, but also from the same political party. "Nominal competition" was getting hot, tight, and couldn't be denied. However, the consideration is less empirical finding footing in the midst of society, given the level of criticism and political education is inadequate. Plus the political elites and the candidates were more adaptable to the circumstances existing in communities. As a result, the practice of money politics more likely caused by subjective considerations, which is far from the kind of external influences, such as proportional system (opened or closed).

Keywords: *proportional system, politics, pragmatism*

ABSTRAK

Proporsional Representasi System (Sistem Proporsional Terbuka) adalah pertimbangan untuk mendorong kandidat bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan mereka. Upaya perekrutan massa dilakukan dengan cara pragmatis, membentuk tim jaringan terluas bertugas memenangkan calon, dan melengkapi mereka dengan sejumlah uang. Network Success Team (Timses) dihadapkan tidak hanya dengan kandidat Times dari partai politik yang berbeda, tetapi juga dari partai politik yang sama. "Nominal Competition" sangat panas, ketat, dan tidak bisa di sangkal. Namun, pertimbangan kurang empiris menemukan pijakan di tengah-tengah masyarakat, mengingat tingkat kritik dan pendidikan politik yang memadai. Ditambah dampak elit politik dan para kelompok kandidat lebih mudah beradaptasi dengan keadaan yang ada di masyarakat. Akibatnya, praktik politik uang lebih mungkin disebabkan oleh pertimbangan subjektif, yang jauh dari jenis pengaruh eksternal, seperti sistem proporsional (terbuka atau tertutup).

Kata Kunci : sistem proporsional, politik, pragmatisme

PENDAHULUAN

Dalam bahasa yang satiris dapat dikatakan, apakah demokrasi betul-betul seruan akan nilai-nilai kemanusiaan, ataukah kedok untuk memuluskan jalan bagi pihak yang kuasa, dominan, bermodal? Atau dengan kalimat lain; apakah Pemilihan Legeslatif dengan sistem Proporsional Terbuka betul-betul seruan akan nilai-nilai

kemanusiaan, ataukah tameng untuk menutup-nutupi hasrat berkuasa para pemodal, agar mendapat landasan legitimatif yuridis dalam menaklukkan musuh-musuh kecilnya? Sebaliknya, apakah sistem Proporsional Tertutup betul-betul seruan akan nilai-nilai kemanusiaan, ataukah topeng untuk menyembunyikan praktek-praktek kotor di belakang layar?

Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menilai, penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014 diwarnai kekisruhan, akibat penerapan sistem proporsional terbuka. Penyelenggaraan Pemilu 2014 pun dinilai lebih buruk dibanding Pemilu 2009.¹ Praktek kotor politik merajalela di tengah-tengah masyarakat, penyelenggara pemilu, dan Caleg. Sebab sistem proporsional terbuka mendorong, mau tidak mau, *money politics* (politik uang) dan kecurangan-kecurangan dalam bentuk lainnya.

Muncullah pemikiran reaksioner sebagai alternatif dari Parpol-parpol seperti PKS, PKB, dan PDIP. Almuzzammil Yusuf, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR RI, menilai penerapan sistem proporsional terbuka dalam Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014 perlu dikaji ulang.² Sistem proporsional tertutup dianggap lebih menjamin penguatan organisasi partai politik, diselenggarakannya pendidikan politik di kalangan *grassroot* (masyarakat), khususnya pada detik-detik menjelang kampanye, parpol akan melakukan seleksi kandidat dengan berbasis pada kualitas dan kapasitas (bobot, bibit dan bebet) kader mereka. Semua ini dinilai sebagai keuntungan dari sistem proporsional tertutup.

Namun demikian, kelemahan di dalam sistem proporsional terbuka dan keunggulan yang dimiliki sistem proposional tertutup bukanlah dua hal yang perlu dikonfrontasikan. Karena logika konfrontasi (mendatangkan antitesa pada tesa yang dianggap cacat) bukan perlakuan yang adil dalam pentas politik. Sistem proporsional terbuka memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon legislatif walaupun berbeda nomor urut dan kemampuan finansial, untuk berhak menduduki parlemen. Apalagi, formulasi perhitungan yang jelas dan kepastian akan

keterpilihan didasarkan suara terbanyak, mendekati atmosfer demokratis. Pada saat yang sama, di dalam suasana yang demokratis ini, Caleg yang tidak bermodal kapital besar, ia bisa berkreasi dan berinovasi dalam membangun popularitas dan keterpilihan dirinya pada rakyat.

Sementara itu, sistem proporsional tertutup bukanlah wahyu suci dari langit yang tanpa noda. Justru, melalui sistem ini pula praktik-praktik *money politics* dilanggengkan. Setiap pemilihan nomor urut calon legislatif menjadi ajang praktik *money politics* di internal partai. Ditambah lagi, munculnya “raja-raja kecil” yang direpresntasikan oleh pemimpin-pemimpin partai politik. Sebagai “raja” di istananya (Parpol), para elite ini memegang peranan yang sangat dominan, terlebih dalam menentukan calon-calon legislatif yang harus diusung oleh rakyat.

Kekuasaan oligarkis semakin mengakar di dalam tubuh partai politik, dan cita-cita demokratis pun memudar.³

Dengan begitu, sistem proporsional baik yang bersifat tertutup maupun terbuka, sama-sama mengundang seluruh elemen yang terlibat dalam politik untuk bermain *duit* (uang). Agen-agen politik dari level elite sampai *grassroot* terdorong untuk memanfaatkan sistem yang dibuat negara sebagai ladang memanen uang (*capital*). Karenanya, pertanyaan manakah sistem terbaik dari keduanya, guna meminimalisir praktik politik berbiaya tinggi, yang menciderai cita-cita demokrasi, dan memandulkan kritisisme rakyat, adalah pertanyaan yang sangat tidak relevan. Sebab, agen-agen politik (elite maupun rakyat biasa) masih memilih kehendak diri, yang selalu bertujuan dan berubah sesuai perubahan interaksi mereka.

Sistem (proporsional tertutup ataupun terbuka) yang dibuat berdasar hukum, bagaimanapun juga, adalah objek yang statis. Masyarakat dan seluruh fenomena

³ Dwi Aroem Hadiatie, “Sistem Proporsional Terbuka Masih Pilihan Terbaik”, dalam <http://politik.kompasiana.com>, diakses 23 Mei 2014

¹ Jimly Asshiddiqie, “Jimly: Pemilu 2014 Lebih Kisruh karena Sistem Proporsional Terbuka”, dalam <http://nasional.kompas.com>, diakses 23 Mei 2014

² Almuzzammil Yusuf, “Kaji Ulang Sistem Proporsional Terbuka”, dalam <http://www.suarapembaruan.com/>, diakses 23 Mei 2014

sosial bersifat dinamis dan terus berubah. Menyandarkan sesuatu yang statis pada sandaran yang dinamis merupakan logika yang rumit dipahami. Karenanya, menemukan satu logika yang cukup stabil di antara kumpulan fenomena yang dinamis, menjadi tanggungjawab bersama, terlebih bagi pakar yang mendalami sosiologi politik. Yang pada akhirnya, usaha penemuan ini dapat dijadikan bahan formulasi hukum dalam menciptakan suatu sistem.

Masyarakat Kabupaten Sumenep, Madura, hanya satu sampel dalam penelitian ini, yang cukup representatif untuk menunjukkan adanya stabilitas logika dalam tumpukan realitas-realitas sosial yang dinamis. Dinamika politik di Sumenep sangat menarik dan unik, seperti yang ditampilkan pada Pemilihan Legeslatif (Pileg) April 2014 yang lalu. Di tengah-tengah kondisi geografis yang tandus dan panas, masyarakat terjun dalam politik langsung dengan kesadaran penuh, berafiliasi ke berbagai Partai Politik (Parpol), bergeser dari Parpol *incumbent* ke Parpol pendatang, melanggengkan praktik politik berbiaya tinggi, dan pada saat yang sama, mereka memegang dan memiliki serpihan-serpihan ideologi yang kokoh, nilai perjuangan, tujuan dan harapan, serta kritik-kritik sederhana namun tajam.

Dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan teori Pragmatisme sosiologis, peneliti ingin memotret fenomena politik masyarakat Sumenep dan memetakan tiga hal utama dari mereka; persepsi dan orientasi terhadap suatu objek (baca: politik dan Pileg), interaksi-interaksi sepanjang keterlibatan mereka, dan makna-makna yang terus berubah/dinamis sepanjang waktu yang berubah akibat perubahan interaksi-interaksi tersebut. Dari sini dapat ditangkap hal-hal yang dinamis dari makna-makna sekaligus tindakan-tindakan interaktif masyarakat, juga hal-hal yang stabil dari semua itu. Semua penjelasan ini akan mengantarkan pada kesimpulan dan pengukuran sejauh mana sistem pemilihan (proporsional terbuka) berdampak pada perilaku politik elite maupun

masyarakat.

Sebelum memasuki inti kajian lebih jauh, terlebih dahulu peneliti ingin menguraikan tentang landasan teori yang digunakan, supaya dapat dimengerti apa yang hendak dicapai. Disusul dengan bahasan tentang aspek geografis dan demografis masyarakat Sumenep guna memberikan gambaran seputar pentas objek yang dibicarakan. Baru setelah itu, peneliti ingin menyampaikan politik masyarakat yang berbau kapitalisme, yang memanfaatkan sistem proporsional terbuka sebagai ajang mengeruk kekayaan para calon legeslatif (Caleg). Pada saat yang sama, para Caleg menyadari bahwa sistem proporsional terbuka memungkinkan diri mereka untuk membeli suara konstituen.

METODE PENELITIAN

Secara sederhana, teori pragmatisme sosial bekerja untuk memberikan bingkai logika guna memahami fenomena-fenomena masyarakat sebagai akibat atau konsekuensi dari tindakan praktis. Pada saat yang sama, tindakan-tindakan praktis bukanlah hasil dari stimuli-stimuli eksternal di luar diri individu. Meskipun faktor eks bagi penganut Utilitarianisme sosial sangatlah penting, namun tidaklah begitu di dalam pragmatisme. Al-hasil, teori pragmatisme sosial mencoba membentuk dan memahami makna tindakan sosial sebagai konsekuensi-konsekuensi.

Pernyataan umum dalam teori pragmatisme seperti di atas memacu para pakar untuk mengembangkan pemikiran tentang penolakan terhadap perbedaan antara pikiran dan tindakan. Dualisme Cartesian yang mengakomodir perbedaan keduanya ditentang oleh pakar pragmatisme, dengan menawarkan alternatif jawaban baru, yaitu bahwa pikiran dan tindakan bukanlah entitas berbeda melainkan fungsi-fungsi pengaturan yang berbeda dari dunia. Dalam prakteknya, teori ini dapat digunakan untuk menyatakan bahwa pikiran dan tindakan masyarakat itu sama saja, dan berbeda jauh

dari dunia eksternalnya.⁴

Karena dunia berada jauh dari diri manusia, maka dunia luar yang eksternal itu tidak berpengaruh pada keputusan manusia dalam memilih tindakan. Veblen dengan tegas menolak pandangan yang mengatakan organisme manusia dapat diarahkan oleh rangsangan-rangsangan eksternal menuju suatu arah yang telah ditentukan sebelumnya. Veblen sangat tidak percaya bahwa organisme manusia tidak akan berubah lantaran hanya berada di bawah satu kendali tertentu.⁵ Ini artinya, manusia selalu dihadapkan pada pilihan yang muncul dari dalam dirinya sendiri, terlebih dalam menyikapi kondisi-kondisi yang ada di hadapannya.

Kemampuan untuk selalu mempertimbangkan kehadiran yang eksternal merupakan kualitas unik, yang kata James, melekat pada insting manusia. Kualitas unik ini disebut juga sebagai sebuah kesadaran, kritisisme, kepentingan, identitas, ideologi, dan sejenisnya. James mengatakan, oleh sebab adanya ingatan, kekuatan merenung, dan kekuatan untuk memberikan tafsir atau makna, maka pengalaman dalam bentuk dorongan impulsif selalu terkait dengan perkiraan manusia tentang hasil-hasil atau akibat-akibatnya.⁶ Sederhananya, selalu ada kepentingan yang hendak dicapai dari tindakannya. Kepentingan ini muncul dari dalam diri saat dihadapkan pada kondisi eksternal di luar diri.

Khusus terkait kepentingan inilah, Veblen mengatakan bahwa insting manusia sendiri berarti upaya sadar dalam mengejar suatu tujuan objektif yang dianggap berharga oleh insting yang bersangkutan.⁷ Terdapat semacam logika untung-rugi, benefit-defisit,

⁴ Hans Joas, "Symbolic Interactionism", dalam A. Giddens dan J. Turner (ed.), *Social Theory Today*, (Cambridge: Polity, 1987), h. 96-106

⁵ Thorstein Veblen, *The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Arts*, (New York: Viking, 1914), h. 73

⁶ William James, *Principles of Psychology*, vol. 2, (New York: Henry Holt, 1890), h. 390

⁷ Thorstein Veblen, *The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Arts*, h. 5

serta logika-logika matematis-ekonomis lainnya. Insting manusia cenderung mengarah pada pencapaian-pencapaian ekonomis tertentu dengan kualitas-kualitas khusus. Karenanya, di dalam suatu kondisi tertentu, insting selalu memotret adanya kemungkinan yang dianggap mendatangkan profit atau apapun yang menguntungkan dirinya.

Karya yang bekerja dengan pendekatan sosiologis dan teori pragmatis ini, salah satunya dan yang cukup terkenal, adalah karya Max Weber yang berjudul *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Secara keseluruhan, karya Weber memotret perilaku masyarakat kapitalis sebagai konsekuensi atau akibat dari adanya ajaran-ajaran agama. Dan menurut Weber, emosi-emosi yang mendasari agama bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan doktrin-doktrin agama itu sendiri, melainkan merupakan sesuatu yang sangat elemental.⁸ Pada akhirnya, Weber ingin mengatakan bahwa emosi-emosi masyarakat dan makna-makna yang mereka sematkan ke dalam tindakan-tindakan kapitalistik adalah elemen yang paling fundamental, terlebih dalam kajian sosiologis.

Dengan pendekatan yang sama seperti Max Weber lakukan, serta teori pragmatisme sosial yang digunakan, peneliti ingin memotret kondisi-kondisi eksternal masyarakat Sumenep sekaligus emosi-emosi mereka selama terlibat dalam politik praktis. Lebih spesifik lagi, peneliti ingin menemukan relasi antara fenomena *money politics* yang menggejala dengan sistem proporsional terbuka yang dilegitimasi hukum yuridis negara kita. Apakah memang benar sistem politik tersebutlah yang membuka pintu masuk bagi praktik politik berbiaya tinggi, atautakah sebagaimana ditegaskan dalam teori pragmatisme sosial, yakni agen-agen politiknya yang berperan penting dalam menentukan sikapnya sendiri, tanpa ada tekanan eksternal yang cukup berpengaruh dalam memastikan dan mengarahkan pola politik masyarakat.

⁸ Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, (London: HarperCollins, 1991), h. 232-233

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografi dan Demografi

Kabupaten Sumenep adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas 2,093.46 km. Seluas 423.96 km² terdiri dari hutan, 14.68 km² berupa padang rumput atau kosong tanah, 1,130.19 km² digunakan untuk lahan pertanian, tegalan, lahan-lahan semak belukar, 59.07 km² berupa rawa-rawa, payau, dan 63.41 km² untuk lahan-lahan lainnya. Selanjutnya, luas lahan potensial di kabupaten Sumenep untuk keanekaragaman sumber daya laut dan perikanan mencapai 50.000 km² + (plus).

Secara geografis, Kabupaten Sumenep dibatasi oleh Selat Madura dan Laut Bali di bagian selatan, Laut Jawa di bagian utara, Kabupaten Pamekasan di bagian barat (satu-satunya perbatasan tanah di daratan), dan oleh Laut Jawa dan Flores di bagian timur. Pulang yang dikelilingi lautan inilah salah satu alasan tinggal di Madura sangatlah panas, yang mengakibatkan warna kulit tampak sawo matang dan hitam. Selain itu, angin yang kencang berhembus dari laut ke darat memaksa orang-orang untuk berbicara dengan nada suara yang sedikit meninggi, karenanya mereka tampak keras dan nyaring saat berkomunikasi.

Berdasarkan sensus 2010, jumlah penduduk Sumenep mencapai 1.041.915, yang terdiri dari 495.099 pria dan wanita 546.816. Kawasan dengan jumlah penduduk terpadat adalah Sumenep Kota yang mencapai 70,794 (6,75%) jiwa, diikuti Pragaan dengan 65,031 orang (5,90%), dan distrik Arjasa dengan 59,701 orang (5,73%). Tetapi, pada saat yang sama, jumlah para perantau yang keluar dari Madura jauh lebih banyak daripada perantau yang masuk ke Madura. Jika dilihat dari tujuan perantauan masyarakat Madura maka dapat dibilang bahwa orang-orang Madura menyebar ke Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan ke pulau-pula Timur. Tak

jarang, Arab Saudi, Malaysia, Singapura, menjadi negara-negara tujuan mereka merantau. Motif perantauan pun beragam, mulai dari mencari ilmu pengetahuan hingga untuk kepentingan ekonomi.

Masyarakat Sumenep, sebagian tinggal di ujung timur pulau Madura dan sebagian lagi tersebar di banyak pulau yang membentang hingga ke timur dan ke selatan pulau Madura. Untuk itulah, pada saat menjelang Pemilihan Umum, Daerah Pemilihan (Dapil) dibagi menjadi tujuh Dapil, sebagian berada di daratan Madura dan sebagian lagi di kepulauan. Tujuh Dapil tersebut terdiri dari 27 Kecamatan yang ada sekabupaten, yaitu: Ambunten, Arjasa (Kangean Islands), Batang Batang, Batuan, Batuputih, Bluto, Dasuk, Dungkek, Ganding, Gapura, Gayam (Sapudi Island), Giligenteng, Guluk-Guluk, Kalianget, Kangean, Kota Sumenep, Lenteng, Manding, Masalembu, Nonggunong, Pasongsongan, Pragaan, Raas, Rubaru, Sapeken, Saronggi, dan Talango.

Dari dua puluh tujuh kecamatan ini, tingkat perekonomian masyarakatnya hampir tidak jauh berbeda. Tidak seperti masyarakat kota metropolitan, dimana kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin sangat mencolok. Dan mayoritas tingkat ekonomi masyarakat termasuk golongan menengah ke bawah. Sekalipun ada perbedaan tingkat kesejahteraan, namun perbedaannya tidak terlalu tajam.

Dilihat dari mata komoditas yang dihasilkan masyarakat Sumenep, dapat diketahui adanya dua macam tanaman yang ditanam penduduk: pertama, komoditas beras (padi) dan komoditi biji-bijian dan umbi-umbiaan (seperti jagung, kedelai, kacang, kacang hijau, singkong dan ubi jalar). Komoditas ini sangat signifikan. Kedua, komoditas lain seperti: kacang, mentimun, terong, kangkung, bayam dan tomat tidak terlalu signifikan. Bahkan, komoditas jenis kedua ini bisa tumbuh di halaman rumah atau pekarangan, dan dengan spirit kekeluargaan yang kuat, seringkali komoditas kedua ini tidak diperjual-belikan,

terkecuali ditanam dalam kuantitas besar dan sengaja dibudidayakan.

Selain itu, masyarakat Sumenep senang menanam tembakau, dan menganggapnya sebagai komoditas paling disukai petani. Namun, lima tahun terakhir, masyarakat petani merasa tembakau kurang menguntungkan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi, rasa jera dan kapok itu tidak menjadi fenomena sosial yang merata. Sebagian petani masih memiliki keberanian, dengan tingkat speklusi bisnis berbeda, untuk menanam tembakau di musim-musim tidak memihak. Karena kegigihan bertani tembakau inilah maka Madura menjadi salah satu pemasok tembakau terbesar untuk pabrik-pabrik rokok yang berpusat di Jawa. Berdasar data tahun 2010, produksi tembakau di Sumenep menghabiskan lahan seluas 10.377.94 hektare dan menghasilkan total 2.917.62 ton. Suatu prestasi tersendiri bagi masyarakat.

Karena Sumenep dikelilingi oleh lautan, maka potensi sumber daya ikan laut di perairan Sumenep mampu menghasilkan 22.000 ton per tahun. Menurut perkiraan potensi sumber berkelanjutan, 60% dihitung dari jumlah potensi yang ada atau $60\% \times 229.000 \text{ t} = 137.400 \text{ ton}$ per tahun. Pengembangan produksi perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan produksi dan produktivitas agribisnis yang berorientasi bisnis. Masyarakat yang tinggal di pesisir dapat dibidang berprofesi sebagai nelayan.⁹

Pro-Kontra Sistem Proporsional Terbuka

Dasar hukum sistem proporsional terbuka ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

⁹Sebagian sumber data dikutip dari http://en.wikipedia.org/wiki/Sumenep_Regency, diakses pada 23 Mei 2014. Selebihnya diambil dari pengamatan lapangan dan wawancara dengan masyarakat setempat pada 8-23 April 2014.

Daerah. Pada Pasal 5 Ayat 1 dikatakan dengan tegas bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan *sistem proporsional terbuka*.

Selain itu, Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 juga menjadi pijakan yuridis berlakunya sistem proporsional terbuka. Pasal tersebut berbunyi:

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- c. Dalam hal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh Partai Politik Peserta Pemilu, kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya.¹⁰

Kehadiran UU No 8 Tahun 2012 ini mendapat penentangan keras dari sebagian partai politik (Parpol), seperti PDIP, PKS, PKB. Salah satu bukti adanya partai yang dengan tegas menolak sistem proporsional terbuka ini adalah berkas Ringkasan Permohonan Perkara Nomor 35/PUU-XII/2014 Sistem Proporsional Terbuka, yang

¹⁰ Naskah UU Pemilu Tanggal 5 Maret 2008. Dokumen ini diperoleh dari DPR-RI dan disalin ulang sesuai aslinya.

diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dengan segala pertimbangan-pertimbangan bersifat Yuridis maupun Filosofis, sistem proporsional terbuka ini ditentang oleh sebagian kalangan sehingga menimbulkan pro-kontra yang berkepanjangan, bisa dibilang hingga tahun 2014 ini, terlebih dengan terbuktinya sistem proporsional terbuka dianggap menciderai citra Pileg 2014 sebagai Pileg terburuk dibanding periode sebelumnya.

Respon Masyarakat Politik Terhadap Sistem Proporsional Terbuka

Hama, seorang perempuan paruh baya berusia 40an, yang belum tamat Sekolah Ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar), diminta menjadi salah satu anggota Tim Sukses (Timses) Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) oleh salah Caleg di Dapil V. Tingkat pendidikan seorang bukanlah syarat utama untuk diberi kepercayaan oleh Caleg, sehingga Hama layak masuk ke dalam list Timses Caleg dari Gerindra. Hal itu terbukti dengan adanya akurasi antara data calon pemilih yang diajukan oleh Hama kepada Caleg sebelum hari-H dengan jumlah perolehan suara setelah penghitungan selesai. Setiap penyelenggaraan pemilihan umum, baik dari tingkat nasional hingga lokal (baca: Pilkades, Pilkada, Pileg), Hama selalu menjadi incaran para calon untuk dijadikan salah satu dari Timses mereka.

Hama bercerita, "*Reng-oreng ediye pade bei be pelean Kalebun. Epeleya mon bede pessena. Ye sepeping cokop ekajejena mendile mangkata ka pelean, malle bisa melle rojek otabe soto ka Ten Sahna. Ye mon tadek pessena arapa'a epeleya, nyare pakak ka ebher.*"¹¹ Orang-orang di sini (memanfaatkan momen-momen pemilihan legeslatif--pent.) sama seperti halnya (dengan memanfaatkan momen-momen-pent.) pemilihan kepala desa. Akan dipilih jika ada uangnya. Yang penting

cukup buat beli cemilan saat pergi ke tempat pemungutan, supaya (uang tersebut--pent.) bisa digunakan buat membeli rujak atau soto ke Ten Sahna (salah satu penjual Rujak dan Soto terkenal di desa Mandala--pent.). Yah, kalau tidak ada uangnya, buat apa dipilih, hanya bikin mulut hambar (suatu ungkapan orang Mandala untuk menyebut seseorang yang tidak punya uang makan--pent.).

Penjelasan di atas cukup untuk menggambarkan suasana sosiologis masyarakat setempat, dimana individu-individu politik memetakan momen-momen politik, mengidentifikasi kepentingan-kepentingan ekonomis diri mereka, lalu mengambil sikap untuk memilih atau tidak memilih, setelah melalui proses perenungan subjektif yang panjang. Meminjam istilah Veblen, insting masyarakat setempat mengarah pada suatu pertimbangan matematis-ekonomis, mencari-cari peluang untuk mendapatkan uang sekadar cukup buat membeli cemilan saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berdasar dari penjelasan Hama di atas pula, kita memang bisa menerima bahwa kondisi-kondisi eksternal objektif juga berpengaruh, semisal tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, kesejahteraan ekonomi yang belum mapan, dan semacamnya, sebagaimana ditekankan oleh penganut teori strukturalisme-utilitarian. Tetapi, emosi-emosi masyarakat, keinginan-keinginan sederhana mereka, pertimbangan-pertimbangan ekonomis mereka yang tidak seberapa, adalah faktor-faktor internal yang paling menentukan dalam tindakan yang diambil. Agen-agen politik ini bertindak, menerima uang, meniscayakan praktik politik uang, lantaran adanya pertimbangan-pertimbangan subjektif. Atau dalam istilah yang digunakan Veblen, insting masyarakat memiliki kesengajaan dan tujuan, sehingga mereka beradaptasi dengan tujuan yang diusahakannya.¹²

¹¹ Wawancara pada 10 April 2014

¹² Thorstein Veblen, *The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Arts*, h. 4

Jawaban yang unik didapat oleh peneliti ketika bertanya kepada Hama seperti ini, “mengapa orang akan memilih setelah diberi uang?” Hama menjawab, “*Ye bile’e pole mon tak nga’ satea reya. Padena reng le melle, mon tadek pessena ye tak olle pa apa. Sapa melea mon tak aberri pesse. Kala kacep.*” Yah, kapan lagi kalau bukan seperti saat-saat sekarang. Seperti orang yang ingin membeli sesuatu, jika tidak punya uang maka ia tidak akan dapat apapun. Siapa yang mau memilih jika tidak diberi uang. Sampai beku!! (suatu ungkapan masyarakat setempat untuk menunjukkan kemustahilan).

Jawaban di atas sangat unik lantaran, berdasarkan penilaian Hama terhadap masyarakatnya, momen Pileg dianggap sebagai kesempatan satu-satunya bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan besar dan langsung. Bahkan “logika untung” tersebut diibaratkan dengan transaksi jual-beli barang. Tidak ada uang, tidak ada suara. Masyarakat juga merasa memiliki bargaining-position, daya tawar yang kuat. Artinya, setelah mengidentifikasi diri dan kondisi, masyarakat berpikir tentang sikap apa yang harus mereka ambil guna meraih untung, dan ternyata, praktik politik uang adalah jawaban sederhana yang mereka ketahui. Melihat, merenung, berpikir, dan mengambil keputusan yang ujung-ujungnya mengarah pada hasil atau akibat, adalah logika pragmatis.¹³

Lebih jauh peneliti ingin mengetahui tentang emosi-emosi atau insting-insting para Caleg. Namun, demi pertimbangan etis, yuridis, politis, dan probabilitas, peneliti tidak langsung mewawancari para Caleg maupun Anggota Legeslatif yang terpilih. Tetapi, melalui penjelasan yang diperoleh dari para Timses mereka baik pra ataupun pasca 9 April. Supyan, seorang putra pesantren terkenal di Dapil V sekaligus Timses dari seorang Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengatakan tentang visi-misi Caleg

yang diusungnya serta komitmennya kelak jika terpilih. Di akhir wawancara, bapak Supyan mengatakan adanya sejumlah uang yang akan diberikan kepada relawan dan massa pendukung Caleg PKS tersebut.

Supyan bercerita, “*Ka essa’ orang sogi, bennyak tambekna, samiliar bede mon sataon hasella. artena, ka essa’ tak boto ka pesse. Kebileng cokop ka pesse. Tape, karana terro abentoa masyarakat lebet politik, enggi apangrasa kodu acalon. Aneka bede teteben sakonek ka anggung reng-oreng.*” Dia (informan menyembunyikan nama Caleg yang diusungnya-pent.) adalah orang kaya raya, banyak memiliki tambak, satu miliar ada dalam setahun hasil bersihnya. artinya, dia tidak butuh lagi pada uang. termasuk orang yang berkecukupan. tetapi, lantaran ingin berjuang demi rakyat lewat politik, maka dia merasa harus mencalonkan diri. Ini ada titipan sedikit (menunjuk ke uang--pent.) untuk orang-orang (sukarelawan, pemilih, massa pendukung--pent.).¹⁴

Sebagai Timses, memang selayaknya menampilkan sisi positif dan mengkampanyekan Caleg yang diusung. Tetapi, sejatinya, jika disadari, maka Supyan telah bermain simbol-simbol. Dia menampakkan sekaligus menyembunyikan makna terdalam dari apa yang dia katakan. Di satu sisi, Caleg yang diusungnya dipersepsikan sebagai calon pembela rakyat. Di sisi lain, pada saat bersamaan, Caleg tersebut menitipkan sejumlah uang yang harus dibagi-bagikan. Dari sini dapat diketahui bahwa sang Caleg memiliki keinginan membela rakyat dengan cara membeli suara mereka di awal, yakni sebelum hari-H.

Fenomena Caleg semacam ini dapat dianalisis dengan pendekatan William James. Dia mengatakan bahwa organisme manusia bukanlah produk dari kekuatan-kekuatan eksternal yang menguasainya. Sebaliknya, manusia memiliki kepentingan-kepentingan yang terus direalisasikan,

¹³ William James, *Principles of Psychology*, vol. 2, h. 390

¹⁴ Wawancara dengan bapak Supyan, tanggal 8 April 2014

yakni dengan cara menciptakan situasi dan kondisi yang selaras dengan kebutuhan adaptifnya.¹⁵ Artinya, dalam konteks logika ini, Caleg PKS itu memiliki kepentingan pribadi, yang kemudian diwujudkan dengan cara beradaptasi pada situasi yang berlaku di masyarakat.¹⁶ Tentu saja, kepentingan si Caleg adalah kemenangan, dan situasi yang diadaptasi adalah praktik politik uang sekaligus masyarakat yang menerima dan melanggengkan politik berbiaya tinggi tersebut.

Pertanyaannya, setelah mempertimbangkan emosi dan kondisi masyarakat maupun Caleg sendiri, yang sama-sama menerima kehadiran politik uang sebagai sebuah keniscayaan dan realitas objektif, lantas apa sikap mereka terhadap hukum negara yang mewajibkan sistem proporsional terbuka? Apakah sistem yuridis tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap masyarakat politik (Caleg dan konstituen)? Jika iya, maka sejauh mana pengaruhnya?

Untuk menjawabnya kita perlu mengutip perkataan James, “hanya hal-hal yang saya perhatikan sajalah yang membentuk pikiran saya, dan apa yang diperhatikan itu tidaklah tercapai begitu saja, yang akan mengarahkan pengalaman menjadi suatu *chaos* total, melainkan muncul dari kepentingan selektif

¹⁵ William James, *Principles of Psychology*, vol. 1, (New York: Henry Holt, 1890), h. 402

¹⁶ Hemat saya, berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Zaini, saat wawancara pada 7 April 2014, tentang nama-nama Caleg yang berasal dari kalangan tokoh agama namun juga mempraktekkan politik uang, adalah sebuah gejala yang hanya bisa dijelaskan melalui konsep *looking-glass self* dari Cooley (1964). Cooley mengatakan evaluasi dan perasaan-diri seorang individu berasal dari pemahamannya tentang bagaimana orang-orang lain memahami dirinya. Lihat C.H. Cooley, *Human Nature and Social Order*, (New York: Schocken Books, 1964), 208. Siapapun calonnya, lantaran hidup di tengah-tengah masyarakat yang pragmatis, maka dia terpaksa terlibat dalam pragmatisme berpolitik yang serupa. Inilah alasan mengapa sebagian tokoh kiai, baik yang menjadi Caleg atau Timses, juga mendukung secara diam-diam terhadap praktik *money politics*.

(*selective interest*)”.¹⁷ Artinya, ada semacam kepentingan yang bersemayam dalam diri manusia. Kepentingan inilah kemudian yang menyeleksi, mengidentifikasi, dan memetakan kondisi-kondisi eksternal, menuntut diri beradaptasi dengan lingkungan. Dengan kata lain, faktor internal-lah yang membingkai seluruh hal-hal eksternal, sehingga tidak terjadi *chaos* total.

Satu pandangan yang menarik disampaikan oleh Muawiyah, sebagai tokoh masyarakat, pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Amal, Desa Gadu Barat Kecamatan Ganding, dan anggota Timses Caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) di Dapil III. Pandangannya menggambarkan tentang idealisme berbangsa dan bernegara di mata masyarakat Sumenep secara umum. Dia mengatakan, “*kabennyaan orang Sumenep neka tak ngarte mon etanyagi masalah nagere, ideologina partai-partai, sepenting laju norok ka oreng se ekangarte. Napa pole etanya agi masalah sistem proposional nga' geneka, pasti sajen tak ngarte.*” Mayoritas masyarakat Sumenep itu tidaklah mengerti jika ditanya soal negara, ideologi masing-masing partai, yang penting mereka langsung mengikuti apa orang yang mereka kenal. Apalagi, mereka ditanya soal sistem proporsional semacam itu, sudah pasti tidak akan mengerti.¹⁸

Penjelasan dari Muawiyah menggambarkan absesnya relasi sistem proporsional terbuka terhadap fenomena sosial yang melegitimasi praktik politik uang. Dengan kata lain, sistem proporsional (baik terbuka maupun tertutup) dan praktik politik uang adalah dua entitas yang berbeda, dua ruang yang saling menjauh, sementara emosi masyarakat tidak menjembatani kedua entitas atau ruang tersebut.¹⁹ Putusnya relasi yang

¹⁷ William James, *Principles of Psychology*, vol. 1, Ibid., 402

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Nyai Muawiyah, S.Pdi., M.Pdi., tanggal 20 April 2014

¹⁹ Politik uang lebih tepat dikatakan bersumber dari keinginan masyarakat untuk mendapat uang, karena uang bisa memberikan gambaran yang jelas tentang

bisa dimainkan oleh emosi rakyat semacam itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan, pendidikan politik, yang tidak kritis. Artinya, ada banyak alasan untuk mengatakan bahwa praktik politik uang di tengah-tengah masyarakat tidak langsung bersumber dari sistem pemilihan yang mengadopsi sistem proporsional terbuka.

Sebaliknya, ketidaktahuan tentang detail politik kebangsaan dan kenegaraan, tentang partai dan seluruh seluk-beluknya yang rumit, adalah penghalang terciptanya perasaan dan pikiran masyarakat. Dengan begitu, sistem proporsional terbuka terlepas nyaris sepenuhnya dari fenomena sosial yang terjadi (baca: *money politics*). Lebih tepatnya, kita mengatakan praktik politik uang di masyarakat muncul dari pertimbangan subjektif, dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal apapun, khususnya sistem proporsional. Di sinilah letak konteks ucapan James, “hanya hal-hal yang saya perhatikan saja yang membentuk pikiran saya.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Praktik Politik Uang (*Money Politics*) yang merajalela di masyarakat-masyarakat pedesaan, khususnya di Sumenep, tidak berkaitan langsung dengan adanya undang-undang negara yang menetapkan sistem proporsional terbuka sebagai sistem yang digunakan dalam pemilihan umum dan penetapan pemenang. Sebaliknya, praktik politik uang tersebut dilanggengkan oleh logika dan psikologi masyarakat yang pragmatis, terlebih para elite politik tidak mampu memberikan pencerah, dan malah ikut beradaptasi pada kondisi politik yang

keuntungan yang akan didapatnya baik di hari itu juga maupun untuk kepentingan hari esok mereka, semisal untuk tambahan belanja keluarga. Psikologi masyarakat demikian sejalan dengan pertanyaan William James bahwa rasa tidak nyaman yang ditimbulkan oleh ketidakpastian di masa depan hanya bisa diatasi oleh satu perasaan memiliki harapan (*feeling expectancy*), dan perasaan ini adalah dasar dari seluruh rasionalitas. Lihat William James, *The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy*, (New York: Dover, 1956), h. 77-79

tidak sehat.

Tulisan dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan sekaligus masukan bahwa sistem apapun, baik proporsional terbuka maupun tertutup, bukanlah problem utama munculnya politik berbiaya tinggi. Sebaliknya, politik yang tidak sehat ini digawangi oleh logika masyarakat yang pragmatis, tentu dengan segala pertimbangan subjektif mereka.

Kekurangan yang masih tampak dalam tulisan ini adalah tidak memadainya teori-teori sosial, khususnya pragmatisme sosiologis, untuk menjelaskan arah-arrah perenungan, pemikiran, dan logika subjektif individu politik. Sehingga, tulisan ini berhenti pada hipotesis bahwa masyarakat memiliki pertimbangan pragmatis, yang mempengaruhi politik lokal maupun nasional, dan berdampak pada langgengnya politik uang. Tanpa bisa memetakan satu persatu dengan jelas logika-logika dan pertimbangan-pertimbangan subjektif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Almuzzammil Yusuf, “Kaji Ulang Sistem Proporsional Terbuka”, dalam <http://www.suarapembaruan.com/>, diakses 23 Mei 2014
- C.H. Cooley, *Human Nature and Social Order*, (New York: Schocken Books, 1964)
- Dwi Aroem Hadiatie, “Sistem Proporsional Terbuka Masih Pilihan Terbaik”, dalam <http://politik.kompasiana.com>, diakses 23 Mei 2014
- Hans Joas, “Symbolic Interactionism”, dalam A. Giddens dan J. Turner (ed.), *Social Theory Today*, (Cambridge: Polity, 1987)
- [Http://en.wikipedia.org/wiki/sumenep_regency](http://en.wikipedia.org/wiki/sumenep_regency), diakses pada 23 Mei 2014.
- Jimly Asshiddiqie, “Jimly: Pemilu 2014 Lebih Kisruh karena Sistem Proporsional Terbuka”, dalam <http://nasional.kompas.com>, diakses 23 Mei 2014
- Max Weber, *The Protestant Ethic and*

- the Spirit of Capitalism, (London: HarperCollins, 1991)
- Naskah Arsip Partai Kebangkitan Bangsa tentang Permohonan Perkara Nomor 35/PUU-XII/2014 Sistem Proporsional Terbuka.
- Naskah UU Pemilu Tanggal 5 Maret 2008.
- Thorstein Veblen, *The Instinct of Workmanship and the State of the Industrial Arts*, (New York: Viking, 1914)
- Wawancara dengan bapak Supyan, tanggal 8 April 2014
- Wawancara dengan Ibu Hama pada 10 April 2014
- Wawancara dengan Ibu Nyai Muawiyah, S.Pdi., M.Pdi., tanggal 20 April 2014
- William James, *Principles of Psychology*, vol. 1, (New York: Henry Holt, 1890)
- William James, *Principles of Psychology*, vol. 2, (New York: Henry Holt, 1890)
- William James, *The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy*, (New York: Dover, 1956)